



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PANITIA SELEKSI
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33418
Email: bkpsdmd@babelprov.go.id



PENGUMUMAN
NOMOR: 04/PENG/PANSEL-CASN

TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan kesempatan kepada putra/putri Warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. JUMLAH KEBUTUHAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI FORMASI, RENCANA PENEMPATAN, DAN MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

1. Rincian Jumlah kebutuhan PPPK Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024 sejumlah **500 (Lima Ratus)** Formasi dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, dan III Pengumuman ini.
2. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama **5 (lima)** tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun jabatan yang dilamar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian/penilaian kinerja, dan kesesuaian kompetensi

II. PERSYARATAN PPPK

A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan Umum bagi pelamar Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024 meliputi:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada Jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar PPPK;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian

- Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
 11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
 12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
 13. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
 14. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu;
 - a. PNS; atau
 - b. PPPK,pada tahun anggaran yang sama;
 15. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran
 16. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 17. Untuk ijazah sementara, Surat Keterangan Lulus, dan Bukti Yudisium **tidak berlaku**;
 18. Pelamar **penyandang disabilitas** dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.

B. PERSYARATAN KHUSUS

Persyaratan khusus bagi pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. PPPK Jabatan Fungsional Guru

- a. Kriteria pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) guru di instansi daerah tahun 2024 meliputi:
 - 1) Pelamar prioritas;
 - 2) Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
 - 3) Guru non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di instansi daerah Guru non-ASN di instansi daerah terdiri atas:

- a. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah; atau
 - b. Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar.
- 4) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- b. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, 2, dan 3 hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar;
 - c. Dalam hal terdapat **pelamar prioritas** sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki **surat izin** untuk melamar pada seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi / lembaga/ yayasan;
 - d. Pelamar pada seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat (DIV) dan/ atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada **Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.BI/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024**;
 - e. Pelamar seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru bahasa indonesia atau JF guru bahasa inggris;
 - 2) penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - 3) penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan.
 - f. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.

2. PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan

- a. Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan Tahun 2024 terdiri dari:
 - 1) eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); atau
 - 2) tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN).
Tenaga non-ASN terdiri atas:
 - a) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;

- b) pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
- b. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan 2 hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
- c. Pelamar pada seleksi PPPK JF kesehatan tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan dengan merujuk pada **Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.OI.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.**
- d. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
 - 2) paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- e. Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja sebagai berikut:
 - 1) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II atau pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III;
 - 2) kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;

3. PPPK Jabatan Teknis

- a. Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - 1) Jabatan fungsional; dan
 - 2) Jabatan pelaksana.
- b. Kebutuhan diperuntukkan bagi pelamar:
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); atau
 - 2) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN)
Tenaga non-ASN terdiri atas:
 - a) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; atau
 - b) pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
- c. Pelamar hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
- d. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
 - 2) paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;
- e. Pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja
 - 1) Pimpinan Perangkat Daerah bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II;
 - 2) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;

- 3) Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III khusus Cabang Dinas Pendidikan, Sekolah dan Badan Penghubung;

III. DESKRIPSI TUGAS JABATAN DAN RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN

Penjelasan Informasi terkait tugas jabatan PPPK sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang masing-masing Jabatan dan rentang penghasilan dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>

IV. PERIODE PENDAFTARAN

- a. **Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN** dapat melamar pada pembukaan pendaftaran di Tahap I dari tanggal 5 s.d. 20 Oktober 2024;
- b. **Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah** pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus. dapat melamar pada pembukaan pendaftaran di Tahap II dari tanggal 17 November s.d. 31 Desember 2024.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman lowongan formasi penerimaan PPPK yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat dilihat pada laman <https://babelprov.go.id/> <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> mulai tanggal:
 - a. **05 Oktober s.d 20 Oktober 2024** bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN dan,
 - b. **17 November s.d. 31 Desember 2024** bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintahdengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP atau NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK
3. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan cara :
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah scan KTP Asli/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya);
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun;
 - g. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
 - h. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN;.

- i. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan;
 - j. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1(satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan serta menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
 5. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
 6. Pelamar memilih jenis formasi;
 7. Pelamar memilih instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi/sekolah (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;
 8. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan;
 9. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan meterai/e-meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi);
 10. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali);
 11. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 12. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

VI. DOKUMEN UNGGAH

A. PPPK Jabatan Fungsional Guru

1. Pas foto terbaru berlatar belakang berwarna merah dengan ketentuan wajah terlihat jelas dan berpakaian formal dalam format JPEG;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam format JPEG (scan berwarna);
3. Surat lamaran ditujukan kepada Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, diketik menggunakan komputer, dibubuhi materai Elektronik (E-Materai)/materai tempel Rp. 10.000 dan ditandatangani pelamar sebagaimana format yang dapat diunduh pada laman <https://bkpsdmd.babelprov.go.id>, (scan berwarna);
4. Ijazah asli/Pengganti Ijazah asli (Ijazah asli yang hilang atau rusak) atau Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri menjadi satu file dalam format pdf (scan berwarna);
5. Transkrip/daftar nilai asli dalam format pdf (scan berwarna);

6. Surat pernyataan diketik menggunakan komputer bermaterai Elektronik (E-Materai)/materai tempel dan ditandatangani pelamar dengan melampirkan screenshot (tangkap layar) pada halaman resmi KPU https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik dalam format pdf (contoh surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://bkpsdmd.babelprov.go.id>)

B. PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan

1. Pas foto terbaru berlatar belakang berwarna merah dengan ketentuan wajah terlihat jelas dan berpakaian formal dalam format JPEG;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam format JPEG (scan berwarna)
3. Surat lamaran ditujukan kepada Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, diketik menggunakan komputer, dibubuhi materai Elektronik (E-Materai)/materai tempel Rp. 10.000 dan ditandatangani pelamar sebagaimana format yang dapat diunduh pada laman <https://bkpsdmd.babelprov.go.id>, (scan berwarna);
4. Ijazah asli/Pengganti Ijazah asli (Ijazah asli yang hilang atau rusak) atau Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri menjadi satu file dalam format pdf (scan berwarna),
5. Transkrip/daftar nilai asli dalam format pdf (scan berwarna);
6. Surat pernyataan diketik menggunakan komputer bermaterai Elektronik (E-Materai)/materai tempel dan ditandatangani pelamar dengan melampirkan screenshot (tangkap layar) pada halaman resmi KPU https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik dalam format pdf (contoh surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://bkpsdmd.babelprov.go.id>);
7. Surat Tanda Registrasi Asli (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran
8. Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas yang dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun harus sesuai format sebagaimana terlampir (scan berwarna),
9. Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Bagi pelamar yang tidak terdaftar dalam database non-ASN BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus harus sesuai format sebagaimana terlampir (scan berwarna).
10. Sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024 berdasarkan keputusan Menteri PANRB nomor 391 Tahun 2024 (Persyaratan wajib tambahan).

C. PPPK Jabatan Fungsional/Pelaksana Teknis

1. Pas foto terbaru berlatar belakang berwarna merah dengan ketentuan wajah terlihat jelas dan berpakaian formal dalam format JPEG;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam format JPEG (scan berwarna)
3. Surat lamaran ditujukan kepada Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, diketik menggunakan komputer, dibubuhi materai

- Elektronik (E-Materai)/materai tempel Rp. 10.000 dan ditandatangani pelamar sebagaimana format yang dapat diunduh pada laman <https://bkpsdmd.babelprov.go.id>, (scan berwarna);
4. Ijazah asli/Pengganti Ijazah asli (Ijazah asli yang hilang atau rusak) atau Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri menjadi satu file dalam format pdf (scan berwarna),
 5. Transkrip/daftar nilai asli dalam format pdf (scan berwarna);
 6. Surat pernyataan diketik menggunakan komputer bermaterai Elektronik (E-Materai)/materai tempel dan ditandatangani pelamar dengan melampirkan screenshot (tangkap layar) pada halaman resmi KPU https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik dalam format pdf (contoh surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://bkpsdmd.babelprov.go.id>
 7. Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas yang dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun harus sesuai format sebagaimana terlampir (scan berwarna),
 8. Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Bagi pelamar yang tidak terdaftar dalam database non-ASN BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus harus sesuai format sebagaimana terlampir (scan berwarna).
 9. Sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024 berdasarkan keputusan Menteri PANRB nomor 391 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Persyaratan wajib tambahan).
 10. Bagi pelamar Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Pemula wajib melampirkan :
 - 1) Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 - 2) Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Pemerintah.

VII. PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS

Terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis yang masih berlaku yang mengacu pada keputusan Menteri PANRB nomor 391 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional yang dapat diunduh pada situs <https://bkpsdmd.babelprov.go.id>

VIII. TAHAPAN SELEKSI

- 1) Seleksi pengadaan PPPK terdiri dari 2 (dua) tahap
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* terdiri atas:
 1. Kompetensi teknis;
 2. Kompetensi Manajerial;
 3. Kompetensi Sosial Kultural;
 4. Wawancara.

IX. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi direncanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Panitia Seleksi Nasional;
2. Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada website <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan persyaratan yang ditentukan oleh panitia seleksi;
3. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman [https://sscasn.bkn.go.id.](https://sscasn.bkn.go.id/)
4. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen unggah yang terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

X. MASA SANGGAH SELEKSI ADMINISTRASI

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan melalui SSCASN;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
4. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan apabila kesalahan bukan berasal dari pelamar;
5. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

XI. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN

- A. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi **Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2024), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN**

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	5 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	5 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah (*)	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	5 s.d. 11 November 2024
8	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	24 s.d.31 Desember 2024
14	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	10 s.d. 21 Desember 2024
15	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi	13 s.d. 28 Desember 2024

No.	Kegiatan	Jadwal
	Teknis Tambahan (***)	
16	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	24 s.d. 31 Desember 2024
17	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
18	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

Keterangan:

(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024

(**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

(***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

b. **Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah**

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d. 17 Mei 2025
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d. 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	22 s.d. 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
19	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Keterangan:

(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024

(**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

(***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

XII. LOKASI PELAKSANAAN UJIAN/SELEKSI

1. Lokasi Pelaksanaan Ujian

Lokasi Pelaksanaan Ujian akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman <https://babelprov.go.id> dan <https://bkpsdmd.babelprov.go.id>.

2. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan bersifat tentatif dan apabila ada perubahan akan diumumkan kembali melalui laman <https://babelprov.go.id> dan <https://bkpsdmd.babelprov.go.id>.

XIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengumuman Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 secara resmi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> <https://babelprov.go.id> dan <https://bkpsdmd.babelprov.go.id>;
2. Pelamar yang dinyatakan lulus dan pada saat melengkapi persyaratan administrasi terbukti adanya pemalsuan dokumen secara otomatis dianggap gugur dan peringkat berikutnya dinyatakan sebagai pengganti dan akan diproses sesuai peraturan perundang – undangan;
3. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari :
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. Tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau
 - e. Meninggal dunia;Dalam hal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a sampai dengan e Pejabat Pembina Kepegawaian mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
4. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun dan keputusan Tim Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
5. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Tim Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, sehingga peserta diharapkan tidak melayani/memperdulikan penawaran untuk mempermudah proses pengangkatan sebagai PPPK Tahun 2024;
7. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Tim Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
8. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
9. Kepada pelamar wajib memantau informasi terkini seputar pelaksanaan Pengadaan Penerimaan PPPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui media resmi Pemerintah Provinsi

- Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Pelamar dapat mengetahui status sebagai tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada BKN dapat mengakses laman https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/cek_pegawai_non_asn.
 11. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat menghubungi *Call Center* dan *Helpdesk* PPPK melalui Nomor **082282289240**, pada hari dan jam kerja dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Senin s.d Kamis Pukul 08.30 s.d. 11.30 WIB, istirahat jam 11.30 s.d 13.30 WIB dibuka kembali jam 13.30 s.d 15.30 WIB;
 - b. Jum'at pukul 08.30 s.d. 11.00 WIB, istirahat jam 11.00 s.d 14.00 WIB dibuka kembali jam 14.00 s.d 16.00 WIB.
 12. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Pangkalpinang
Pada Tanggal 2 Oktober 2024

Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan CASN Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Formasi Tahun 2024

{ttd}

FERY AFRIYANTO

LAMPIRAN I
 PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI
 PENGADAAN CASN PEMERINTAH
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 FORMASI TAHUN 2024
 NOMOR : 04/PENG/PANSEL-CASN
 TANGGAL: 2 Oktober 2024

RINCIAN FORMASI
 PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 JABATAN FUNGSIONAL GURU
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
TENAGA GURU			42	
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA BUDHA	Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.BI/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
5	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TANAMAN		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
6	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TERNAK		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
7	AHLI PERTAMA - GURU AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
8	AHLI PERTAMA - GURU AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
9	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
10	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
11	AHLI PERTAMA - GURU		1	PEMERINTAH PROVINSI

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
	BAHASA JEPANG			KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
12	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
13	AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
14	AHLI PERTAMA - GURU BUSANA		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
15	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN KOMUNIKASI VISUAL		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
16	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
17	AHLI PERTAMA - GURU EKONOMI		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
18	AHLI PERTAMA - GURU FISIKA		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
19	AHLI PERTAMA - GURU GEOGRAFI		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
20	AHLI PERTAMA - GURU KECANTIKAN DAN SPA		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
21	AHLI PERTAMA - GURU KIMIA		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
22	AHLI PERTAMA - GURU KULINER		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
23	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
24	AHLI PERTAMA - GURU NAUTIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
				PENDIDIKAN
25	AHLI PERTAMA - GURU PEMASARAN		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
26	AHLI PERTAMA - GURU PENDIDIKAN KHUSUS		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
27	AHLI PERTAMA - GURU PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
28	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
29	AHLI PERTAMA - GURU PERHOTELAN		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
30	AHLI PERTAMA - GURU PPKN		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
31	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
32	AHLI PERTAMA - GURU SEJARAH		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
33	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
34	AHLI PERTAMA - GURU SOSIOLOGI		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
35	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK ELEKTRONIKA		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
36	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
37	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK OTOMOTIF		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
38	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PENGELASAN DAN FABRIKASI LOGAM		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
39	AHLI PERTAMA - GURU TEKNOLOGI FARMASI		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
40	AHLI PERTAMA - GURU TIK		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
41	AHLI PERTAMA - GURU USAHA LAYANAN PARIWISATA		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN
42	AHLI PERTAMA - GURU ANTROPOLOGI		1	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN

Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan CASN Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Formasi Tahun 2024



FERY AFRIYANTO

LAMPIRAN II
 PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI
 PENGADAAN CASN PEMERINTAH
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 FORMASI TAHUN 2024
 NOMOR : 04/PENG/PANSEL-CASN
 TANGGAL : 2 Oktober 2024

RINCIAN FORMASI
 PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 JABATAN FUNSIONAL TENAGA KESEHATAN
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

NO.	NAMA JABATAN	JENIS FORMASI	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
TENAGA KESEHATAN			33		
1	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	KHUSUS	1	Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO DINAS KESEHATAN PELAYANAN DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK
2	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAN BIDANG PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PENUNJANG MEDIK
3	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAN BIDANG PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PENUNJANG MEDIK
4	PERAWAT TERAMPIL	KHUSUS	5		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO DINAS KESEHATAN PELAYANAN DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN
5	NUTRISIONIS TERAMPIL	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO DINAS KESEHATAN PELAYANAN DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK
6	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO DINAS KESEHATAN PELAYANAN DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK
7	PEMBIMBING	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI

NO.	NAMA JABATAN	JENIS FORMASI	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
	KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA				KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH DINAS KESEHATAN BIDANG PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PENUNJANG NON MEDIK
8	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
9	RADIOGRAFER TERAMPIL	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH DINAS KESEHATAN BIDANG PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PENUNJANG MEDIK
10	APOTEKER AHLI PERTAMA	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
11	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH DINAS KESEHATAN BIDANG PELAYANAN SEKSI PELAYANAN MEDIK
12	BIDAN AHLI PERTAMA	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO DINAS KESEHATAN PELAYANAN DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN
13	FISIOTERAPIS TERAMPIL	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO DINAS KESEHATAN PELAYANAN DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK
14	BIDAN TERAMPIL	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO DINAS KESEHATAN PELAYANAN DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN
15	NUTRISIONIS TERAMPIL	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
16	ASISTEN APOTEKER	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

NO.	NAMA JABATAN	JENIS FORMASI	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
	TERAMPIL				BELITUNG DINAS KESEHATAN BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN SEKSI KEFARMASIAN
17	PERAWAT TERAMPIL	KHUSUS	2		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAN BIDANG PELAYANAN SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN
18	PERAWAT AHLI PERTAMA	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO DINAS KESEHATAN PELAYANAN DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN
19	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO DINAS KESEHATAN PELAYANAN DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK
20	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO DINAS KESEHATAN PELAYANAN DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK
21	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAN BIDANG PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PENUNJANG MEDIK
22	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
23	APOTEKER AHLI PERTAMA	KHUSUS	2		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO DINAS KESEHATAN PELAYANAN DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK
24	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN, PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN DINAS KESEHATAN SEKSI KLINIK DAN KESEHATAN MASYARAKAT

NO.	NAMA JABATAN	JENIS FORMASI	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
25	PERAWAT AHLI PERTAMA	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAN BIDANG PELAYANAN SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN
26	RADIOGRAFER TERAMPIL	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO DINAS KESEHATAN PELAYANAN DAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK
27	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	KHUSUS	1		PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan CASN Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Formasi Tahun 2024



FERY AFRIYANTO

LAMPIRAN III
 PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI
 PENGADAAN CASN PEMERINTAH
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 FORMASI TAHUN 2024
 NOMOR : 04/PENG/PANSEL-CASN
 TANGGAL: 2 Oktober 2024

RINCIAN FORMASI
 PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 JABATAN TENAGA TEKNIS
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

NO.	NAMA JABATAN	JENIS FORMASI	JENIS JABATAN	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
TENAGA TEKNIS				425		
1	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	KHUSUS	FUNGSIONAL	1	S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM
2	ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA	KHUSUS	FUNGSIONAL	1	S-1 AKUAKULTUR - S-1 TEKNOLOGI AKUAKULTUR	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKSI PERBENIHAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN
3	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	KHUSUS	FUNGSIONAL	1	S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
4	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	KHUSUS	FUNGSIONAL	8	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA
5	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	KHUSUS	FUNGSIONAL	1	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEKSI REHABILITASI
6	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	KHUSUS	FUNGSIONAL	9	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN SEKSI PEMETAAN, STANDARISASI SARANA PRASARANA KEBAKARAN DAN PERTOLONGAN
7	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	KHUSUS	FUNGSIONAL	3	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO DINAS KESEHATAN SARANA PRASARANA DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
8	PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	FUNGSIONAL	1	S-1 TEKNIK	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN

NO.	NAMA JABATAN	JENIS FORMASI	JENIS JABATAN	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
	AHLI PERTAMA				INFORMATIKA	BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
9	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	KHUSUS	FUNGSIONAL	2	D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN BIDANG PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN PELESTARIAN NASKAH KUNO
10	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	5	SLTA/SMA SEDERAJAT - PERSAMAAN SLTA (PAKET C) - SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI JEBU BEMBANG ANTAN (UNIT II) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUBBAGIAN TATA USAHA
11	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	SMP	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SMAN 1 SIMPANG RIMBA
12	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	3	D-III EKONOMI - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI - D-III KOMPUTER - D-III BAHASA - D-III HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SUBBAGIAN TATA USAHA
13	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III TEKNOLOGI INDUSTRI PAKAN	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN UPTD BALAI BENIH PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SEKSI SARANA DAN PRASARANA
14	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	SMP	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SMA NEGERI 1 PULAU BESAR
15	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI - D-III KEBIDANAN	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BIDANG KEGEOLAGIAN
16	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I SMKN 5 PANGKALPINANG
17	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III KIMIA ANALIS	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SMKN 1 KELAPA
18	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	10	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO DINAS KESEHATAN UMUM DAN KEUANGAN BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
19	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	7	SLTA - SLTA ADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM
20	PENGELOLA UMUM	KHUSUS	PELAKSANA	1	SMP PAKET B	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN

NO.	NAMA JABATAN	JENIS FORMASI	JENIS JABATAN	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
	OPERASIONAL					BANGKA BELITUNG DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM
21	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	PERSAMAAN SLTA - SLTA SEDERAJAT - SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SMAN 1 MEMBALONG
22	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	D-III PERBANKAN SYARIAH - D-III TEKNIK OTOMOTIF	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SMAN 1 KELAPA
23	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	3	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG E- GOVERNMENT DAN STATISTIK
24	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	SLTP/SMP SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA
25	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III EKONOMI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI - D-III KOMPUTER - D-III HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SEKSI SMA/PK
26	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	2	PERSAMAAN SLTA - SLTA SEDERAJAT - SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SMAN 1 SIJUK
27	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	2	SLTA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KEUANGAN DAERAH UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG BADAN KEUANGAN DAERAH SUB BAGIAN TATA USAHA
28	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	4	D-III GIZI / NUTRISI - D-III KEUANGAN DAN PERBANKAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH SUB BAGIAN UMUM
29	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	4	SLTA/SMA SEDERAJAT - PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT
30	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	3	SLTA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SMAN 1 TEMPILANG
31	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	12	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG BINA MARGA
32	PENGADMINISTRASI	KHUSUS	PELAKSANA	1	SLTA/SMA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS

NO.	NAMA JABATAN	JENIS FORMASI	JENIS JABATAN	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
	PERKANTORAN				SEDERAJAT	PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I SMAN 1 NAMANG
33	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	2	SLTA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SMAN 1 PARITIGA
34	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	SLTA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN (UNIT XIII) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUBBAGIAN TATA USAHA
35	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	3	SLTA/SMA SEDERAJAT - PERSAMAAN SLTA (PAKET C) - SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA SUBBAGIAN TATA USAHA
36	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	PERSAMAAN SLTP (PAKET B) - SLTP/SMP SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA LAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA
37	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	SLTP	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN TATA USAHA
38	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	SEKOLAH DASAR UMUM - PAKET A	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SUBBAGIAN TATA USAHA
39	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III EKONOMI	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM
40	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	8	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAN BAGIAN UMUM DAN PENGANGGARAN SUBBAGIAN PENGANGGARAN
41	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	D-III PENDIDIKAN AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I SMAN 2 PANGKAL PINANG
42	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	SEKOLAH DASAR UMUM - PERSAMAAN SD (PAKET A)	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I SMKN 1 SIMPANG KATIS
43	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	4	S-1 SASTRA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ADMINISTRASI	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

NO.	NAMA JABATAN	JENIS FORMASI	JENIS JABATAN	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
					PUBLIK - S-1 ILMU HUKUM	
44	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	PERSAMAAN SD (PAKET A)	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SMK NEGERI 1 SIJUK
45	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	SMP	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II SLB N SUNGAILIAT
46	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	7	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL
47	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA
48	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	1	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I SMAN 4 PANGKAL PINANG
49	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	PERSAMAAN SLTP (PAKET B) - SLTP	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUBBAGIAN TATA USAHA
50	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	2	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KEUANGAN DAERAH UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR BADAN KEUANGAN DAERAH SEKSI PENETAPAN, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
51	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	3	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA/KEMENTERIAN DAN ORGANISASI
52	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	3	SLTP	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SMKN 1 SELAT NASIK
53	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	2	PERSAMAAN SLTA - SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT SUBBAGIAN KEUANGAN
54	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	D-III KOMPUTER AKUNTANSI - D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG BINA MARGA
55	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	SLTP UMUM	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I SLB N KOBA
56	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	PERSAMAAN SLTA - SLTA SEDERAJAT - SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SMKN 1 KELAPA KAMPIT
57	PENGADMINISTRASI	KHUSUS	PELAKSANA	2	PERSAMAAN SLTA -	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN

NO.	NAMA JABATAN	JENIS FORMASI	JENIS JABATAN	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
	PERKANTORAN				SLTA SEDERAJAT - SLTA	BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SMKN 1 SELAT NASIK
58	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	5	SLTA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SMAN 1 KEP. PONGOK
59	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III MANAGEMEN INFORMATIKA - D-III KOMPUTER	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM
60	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III ADMINISTRASI	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SMAN 1 JEBUS
61	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III INSTRUMENTASI DAN ELEKTRONIKA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER
62	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	2	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
63	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	PROGRAM PAKET B SETARA SLTP	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SMAN 1 JEBUS
64	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	3	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM
65	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	2	PERSAMAAN SLTA - SLTA SEDERAJAT - SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA SUBBAGIAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA
66	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	D-III ADMINISTRASI	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SMKN 1 TEMPILANG
67	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG
68	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III TEKNIK KOMPUTER	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SMAN 1 MUNTOK
69	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	4	SLTA/SMA SEDERAJAT - PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM

NO.	NAMA JABATAN	JENIS FORMASI	JENIS JABATAN	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
70	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	SMP - SLTP/SMP SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SMAN 1 KEP. PONGOK
71	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	1	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM
72	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	11	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KEUANGAN
73	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	1	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS TENAGA KERJA SEKRETARIAT
74	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III AKUNTANSI - D-III TEKNIK ARSITEKTUR - D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM
75	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	7	SLTA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
76	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	2	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I SMAN 2 SUNGAI SELAN
77	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	PERSAMAAN SLTA - SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SMA Negeri 1 Damar
78	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	3	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM
79	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	D-III ADMINISTRASI - D-III TELEKOMUNIKASI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SMAN 1 SP TERITIP
80	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	PERSAMAAN SLTP (PAKET B) - SLTP	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA SUBBAGIAN TATA USAHA
81	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	4	SLTA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP
82	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	PERSAMAAN SD (PAKET A)	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SMK NEGERI 1 DENDANG
83	PENGADMINISTRASI	KHUSUS	PELAKSANA	2	SLTA/SMA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN

NO.	NAMA JABATAN	JENIS FORMASI	JENIS JABATAN	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
	PERKANTORAN				SEDERAJAT	BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT
84	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	PERSAMAAN SLTP (PAKET B) - SLTP	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SMAN 1 SIJUK
85	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	1	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER
86	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	3	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN SEKSI KEFARMASIAN
87	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	1	SLTA/SMA SEDERAJAT - PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH BELITUNG SUB BAGIAN TATA USAHA
88	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III NAUTIKA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SMKN 1 TUKAK SADA
89	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I SMAN 1 PANGKAL PINANG
90	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	5	SLTA SEDERAJAT - SLTA - SLTA ADMINISTRASI PERKANTORAN - SMEA ADMINISTRASI	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEKRETARIAT DAERAH BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH SUB BAGIAN TATA USAHA
91	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	2	SLTA/SMA SEDERAJAT - PERSAMAAN SLTA (PAKET C) - SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU (UNIT X) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUBBAGIAN TATA USAHA
92	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	3	PROGRAM PAKET B SETARA SLTP	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SMKN 1 MUNTOK
93	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III EKONOMI MANAJEMEN SDM - D-III KOMPUTERISASI PERKANTORAN DAN KESEKRETARIATAN - D-III ILMU EKONOMI MANAJEMEN SDM - D-III KESEKRETARIATAN BK. PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - D-III ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KEUANGAN DAERAH UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT BADAN KEUANGAN DAERAH SUB BAGIAN TATA USAHA
94	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	3	SLTA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SMAN 1

NO.	NAMA JABATAN	JENIS FORMASI	JENIS JABATAN	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
						KELAPA
95	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	PERSAMAAN SLTP (PAKET B) - SLTP	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SMAN 1 MEMBALONG
96	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	D-III MANAGEMEN INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA
97	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	PERSAMAAN SLTA - SLTA SEDERAJAT - SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SMK NEGERI 1 DENDANG
98	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	D-III KEPERAWATAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III TEKNIK MESIN - D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
99	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	4	PROGRAM PAKET B SETARA SLTP	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SLBN MUNTOK
100	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SMKN 1 PAYUNG
101	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III MANAGEMEN INFORMATIKA - D-III KOMPUTER	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM
102	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	2	PERSAMAAN SLTA - SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SUBBAGIAN TATA USAHA
103	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	1	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I SMAN 1 LUBUK BESAR
104	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	3	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH SUB BAGIAN PERENCANAAN
105	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	D-III ADMINISTRASI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SMAN 1 PARITTIGA
106	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III KEPEGAWAIAN - D-III ADMINISTRASI KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA UPTD BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG DINAS

NO.	NAMA JABATAN	JENIS FORMASI	JENIS JABATAN	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
						PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA SUBBAGIAN TATA USAHA
107	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	PERSAMAAN SLTA - SLTA SEDERAJAT - SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG
108	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III ADMINISTRASI	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SMAN 1 TEMPILANG
109	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	4	SLTA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KEUANGAN DAERAH BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
110	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III EKONOMI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH SUB BAGIAN TATA USAHA
111	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	1	SLTA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KEUANGAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH SUB BIDANG ANGGARAN II
112	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	4	SLTA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SMK NEGERI 1 PULAU BESAR
113	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	D-III ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KEUANGAN DAERAH UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN BADAN KEUANGAN DAERAH SUB BAGIAN TATA USAHA
114	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	2	SLTA - SLTA ADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA
115	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	6	PERSAMAAN SLTA - SLTA - SMA PAKET C	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEKRETARIAT
116	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	3	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM
117	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	3	SLTA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA
118	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	3	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
119	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	1	SLTA/SMA SEDERAJAT - PERSAMAAN SLTA (PAKET C) -	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

NO.	NAMA JABATAN	JENIS FORMASI	JENIS JABATAN	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
					SLTA	HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN (UNIT XIII) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUBBAGIAN TATA USAHA
120	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	3	PERSAMAAN SLTA - SLTA SEDERAJAT - SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SLB N TANJUNGPANDAN
121	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	3	PERSAMAAN SLTA - SLTA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUB BAGIAN TATA USAHA
122	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	3	SLTA/SMA SEDERAJAT - PERSAMAAN SLTA (PAKET C) - SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI RAMBAT MENDUYUNG (UNIT I) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUBBAGIAN TATA USAHA
123	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	D-III EKONOMI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI - D-III KOMPUTER - D-III ARSIPARIS	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN TATA USAHA
124	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	PERSAMAAN SLTP (PAKET B) - SLTP	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GUNUNG DUREN (UNIT XIII) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUBBAGIAN TATA USAHA
125	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	PERSAMAAN SLTP (PAKET B) - SLTP	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SMKN 1 TANJUNGPANDAN
126	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	11	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
127	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	D-III PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SMKN 1 PARIT TIGA
128	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	2	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM
129	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	PERSAMAAN SLTA - SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V SLBN Manggar
130	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III MANAJEMEN - D-III KEBIDANAN	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEKSI PELAYANAN TEKNIS

NO.	NAMA JABATAN	JENIS FORMASI	JENIS JABATAN	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
131	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	PERSAMAAN SD (PAKET A)	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SMKN 1 TEMPILANG
132	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I SMAN 1 PANGKALAN BARU
133	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	3	SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SMAN 1 PAYUNG
134	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	1	SLTA/SMA SEDERAJAT - PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERHUBUNGAN BIDANG ANGKUTAN PELAYARAN SEKSI ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBRANGAN
135	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	4	PERSAMAAN SLTA - SLTA SEDERAJAT - SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEKSI REHABILITASI
136	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III ADMINISTRASI KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI - D-III PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN BANTUAN HUKUM SUBBAGIAN TATA USAHA
137	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	1	SLTA/SMA SEDERAJAT - PERSAMAAN SLTA (PAKET C) - SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH BELITUNG TIMUR SUB BAGIAN TATA USAHA
138	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	D-III ADMINISTRASI TATA PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II SMKN 1 SUNGAILIAT
139	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	3	SLTP/SMP SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SMAN 1 LEPAR PONGOK
140	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	14	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEKRETARIAT DPRD BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
141	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	6	SLTA/SMA SEDERAJAT - PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT
142	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	PERSAMAAN SLTP (PAKET B) - SLTP	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MUNTAI PALAS (UNIT VIII) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUBBAGIAN TATA USAHA
143	PENGADMINISTRASI	KHUSUS	PELAKSANA	5	SLTA SEDERAJAT - PERSAMAAN SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEKRETARIAT

NO.	NAMA JABATAN	JENIS FORMASI	JENIS JABATAN	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
	PERKANTORAN				(PAKET C)	DAERAH BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH SUB BAGIAN TATA USAHA
144	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	1	SLTA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KEUANGAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
145	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	PERSAMAAN SLTP (PAKET B) - SLTP	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BELANTU MENDANAU (UNIT X) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUBBAGIAN TATA USAHA
146	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	3	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II SMAN 2 SUNGAILIAT
147	PRANATA TRANTIBUM	KHUSUS	PELAKSANA	10	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN PERSONIL SATPOL PP SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
148	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	PERSAMAAN SLTA - SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SMAN 1 JEBUS
149	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	2	PROGRAM PAKET B SETARA SLTP	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SMAN 1 PARITIGA
150	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	4	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT
151	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	7	SLTA/SMA SEDERAJAT - PERSAMAAN SLTA (PAKET C) - SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA SEKRETARIAT
152	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	1	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI SUB BAGIAN TATA USAHA
153	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	2	SLTA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KEUANGAN DAERAH UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG BADAN KEUANGAN DAERAH SEKSI PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENAGIHAN
154	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	2	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) - SLTA	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA BIDANG EKONOMI KREATIF
155	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	5	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG INSPEKTORAT DAERAH SEKRETARIAT
156	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	6	SLTA/SMA SEDERAJAT - PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL

NO.	NAMA JABATAN	JENIS FORMASI	JENIS JABATAN	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
						DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM
157	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	1	D-III PENDIDIKAN GEOGRAFI	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SMAN 2 TOBOALI
158	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	PELAKSANA	1	SLTA/SMA SEDERAJAT - PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN SUB BAGIAN TATA USAHA
159	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	3	SLTA/SMA SEDERAJAT	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, INFORMASI KEPEGAWAIN DAN KOMPETENSI ASN
160	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	KHUSUS	PELAKSANA	3	SLTP UMUM	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I SMAN 1 LUBUK BESAR

Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan CASN Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Formasi Tahun 2024



FERY AFRIYANTO

LAMPIRAN IV
PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI
PENGADAAN CASN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
FORMASI TAHUN 2024
NOMOR : 04/PENG/PANSEL-CASN
TANGGAL : 2 Oktober 2024

FORMAT SURAT LAMARAN

Kab/Kota¹⁾, Tanggal²⁾ Oktober 2024
Kepada
Yth. Pj. Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung
di –
PANGKALPINANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (NAMA SESUAI KTP) ³⁾
Tempat/Tanggal Lahir : (Kota/Kab Lahir) / Tanggal Bulan Tahun⁴⁾
Jenis Kelamin : (Pria/Wanita) ⁵⁾
NIK : No NIK ⁶⁾
Pendidikan : (S1/DIV/DIII jurusan/SLTA/SLTP/SD sederajat) ⁷⁾
Jabatan yang dilamar : (Ahli Pertama/ Terampil - Formasi) ⁸⁾
Kategori Peserta : (Khusus)
Agama : Agama ⁹⁾
Alamat sesuai KTP : (Alamat KTP) ¹⁰⁾
Formasi : (Tenaga Kesehatan/ Tenaga Teknis/Tenaga Guru) ¹¹⁾
Nomor HP : (No WA Yang masih aktif) ¹²⁾

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. Sebagai bahan pertimbangan, berikut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat lamaran kepada Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel;
- b. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel;
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. Ijazah asli atau Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
- e. Transkrip/daftar nilai asli;
- f. (Surat Tanda Registrasi (STR)/Sertifikat pendidik) * asli yang masih berlaku;
- g. Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
- h. Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas yang dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun;
- i. Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Bagi pelamar yang tidak terdaftar dalam database non-ASN BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus;
- j. Persyaratan lainnya sesuai dengan yang ditetapkan.

Demikian surat lamaran ini dibuat, adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024.

Yang Membuat,

Materai
Rp. 10.000,-

(NAMA LENGKAP)

Ket.Petunjuk Pengisian:

1. Domisili pelamar
2. Tanggal sesuai periode pembukaan pengumuman (5 s.d. 20 Oktober 2024)
3. Nama sesuai KTP
4. Tempat Tanggal lahir pelamar
5. Cukup jelas
6. Nomor Induk Kependudukan
7. Kualifikasi pendidikan dengan prodi (contoh S1-Manajemen)
8. Contoh PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN
9. Sesuai agama
10. Alamat
11. Pilih salah satu
12. Kontak WA

Point f. Surat Tanda Registrasi (STR) (untuk JF Kesehatan)/Sertifikat pendidik (untuk JF Guru)
Point h dan i dikecualikan untuk JF Guru

Keabsahan penggunaan materai tempel sesuai PMK 134/PMK.03/2021 bahwa penggunaan materai dianggap sah Tanda Tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai Tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun pada materai dilakukannya penandatanganan.

LAMPIRAN V
PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI
PENGADAAN CASN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
FORMASI TAHUN 2024
NOMOR : 04/PENG/PANSEL-CASN
TANGGAL: 2 Oktober 2024

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (NAMA SESUAI KTP) ¹⁾
NIK : (NIK) ²⁾
Tempat dan tanggal lahir : (Kota/Kab Lahir / Tanggal Bulan Tahun) ³⁾
Agama : Agama ⁴⁾
Pendidikan sesuai formasi : (S1/DIV/DIII jurusan/SLTA/SLTP/SD sederajat) ⁵⁾
Alamat : (Alamat KTP) ⁶⁾

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dan jika dinyatakan lulus seleksi bersedia melakukan pemeriksaan dan membuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi yang berwenang;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis dengan dibuktikan hasil screenshot (tangkap layar) pada halaman resmi KPU https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
7. Tidak menuntut diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
8. Bersedia menerima segala Keputusan Tim Seleksi Pengadaan CASN dan tidak akan mengganggu gugat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Kab/Kota⁷⁾, Tanggal⁸⁾ Oktober 2024
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10.000,-

(NAMA LENGKAP)

Ket.Petunjuk Pengisian:

1. Nama sesuai KTP
2. NIK
3. Tempat Tanggal lahir pelamar
4. Agama sesuai KTP
5. Kualifikasi pendidikan dengan prodi (contoh S1-Manajemen)
6. Alamat sesuai KTP
7. Domisili pelamar
8. Tanggal sesuai periode pembukaan pengumuman (5 s.d. 20 Oktober 2024)

Note : Keabsahan penggunaan materai tempel sesuai PMK 134/PMK.03/2021 bahwa penggunaan materai dianggap sah Tanda Tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai Tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan.

Lampiran Surat Pernyataan 8 Point



Cek Anggota & Pengurus Partai Politik Calon Peserta Pemilu

— APAKAH ANDA TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA & PENGURUS PARTAI POLITIK ? —
SILAHKAN MASUKKAN NIK YANG DI CARI

I'm not a robot 
reCAPTCHA
Privacy * Terms

CARI

NIK : 1234567891245678 Tidak Terdaftar dalam sipol

LAMPIRAN VI
PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI
PENGADAAN CASN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
FORMASI TAHUN 2024
NOMOR : 04/PENG/PANSEL-CASN
TANGGAL: 2 Oktober 2024

**FORMAT SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
SESUAI JABATAN YANG DILAMAR
UNTUK TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA**

KOP INSTANSI/LEMBAGA

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
SESUAI JABATAN YANG DILAMAR
NOMOR :**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP) :
Pangkat/Gol. Ruang) :
Jabatan :
Instansi/Lembaga :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : (NAMA SESUAI KTP)
NIK : (NAMA SESUAI KTP)
Tempat/Tanggal Lahir : (Kota/Kab Lahir / Tanggal Bulan Tahun
Pendidikan sesuai Formasi : (S1/DIV/DIII jurusan/SLTA/SLTP/SD
sederajat)

Jabatan yang dilamar :

Telah melaksanakan tugas di Perangkat Daerah
sebagai selamatahun bulan secara terus
menerus, terhitung mulai tanggalbulanTahun sampai
dengan Surat Keterangan ini saya buat, dan berkineja baik.

Adapun yang bersangkutan memiliki tugas harian, sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya untuk memenuhi persyaratan pelamaran Seleksi Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan agar dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

(kota), (tanggal) (bulan) 2024

Nama Jabatan Penandatanganan,
Nama Instansi/Lembaga

Materai
tempel
Rp. 10.000,-

(*ttd+cap stempel basah*)

(Nama Pejabat Penandatanganan)

Note : Keabsahan penggunaan materai tempel sesuai PMK 134/PMK.03/2021 bahwa penggunaan materai dianggap sah Tanda Tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai Tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan

LAMPIRAN VII
PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI
PENGADAAN CASN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
FORMASI TAHUN 2024
NOMOR : 04/PENG/PANSEL-CASN
TANGGAL : 2 Oktober 2024

CONTOH SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA

KOP INSTANSI/LEMBAGA

**SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA
NOMOR :**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP*) :
Pangkat/Gol. Ruang*) :
Jabatan :
Instansi/Lembaga :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan sesuai Formasi :
Jabatan yang dilamar :

adalah pegawai honorer aktif yang bekerja secara terus menerus tanpa terputus di Perangkat Daerah selama tahun bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan Surat Keterangan ini dibuat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum dan/atau dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi Tindakan yang diambil oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(kota), (tanggal) (bulan) 2024

Nama Jabatan Penandatanganan,
Nama Instansi/Lembaga

Materai
tempel
Rp. 10.000,-

(ttd+cap stempel basah)

(Nama Pejabat Penandatanganan)

Note : Keabsahan penggunaan materai tempel sesuai PMK 134/PMK.03/2021 bahwa penggunaan materai dianggap sah Tanda Tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai Tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan.